

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada awal tahun 2020, dunia dihebohkan oleh laporan yang diberikan Tiongkok kepada *World Health Organization* (WHO) mengenai kejadian yang menimpa 44 pasien pneumonia berat di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada hari terakhir tahun 2019. Dokumentasi masyarakat yang tersebar di media sosial menunjukkan kondisi buruk orang yang terinfeksi sehingga kejadian ini menjadi perbincangan dunia. Kemudian, pada 10 Januari 2020 penyebab infeksi berat tersebut mulai diketahui dengan didapatkan kode genetiknya yaitu virus corona baru yang memiliki kedekatan dengan virus corona penyebab *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS) yang mewabah di Hongkong pada tahun 2003 lalu.

Penyebaran virus ini tergolong cepat karena semakin banyak laporan yang diterima WHO mengenai orang-orang yang mengalami gejala infeksi yang sama. Laporan tersebut tidak hanya datang dari Provinsi lain di Tiongkok melainkan juga datang dari luar Tiongkok, diantaranya dari Amerika Serikat (AS), Jepang, Korea Selatan, Thailand bahkan total ada 25 negara yang mulai memberikan laporan yang sama. Orang-orang yang terinfeksi ini ternyata memiliki riwayat perjalanan dari Kota Wuhan dan Tiongkok. Laporan kasus pasien yang terinfeksi virus kemudian semakin meningkat dan menunjukkan tren penularan antar manusia. Pada akhir Januari 2020, dilaporkan bahwa terjadi peningkatan kasus yang tinggi dimana sebanyak 2000 kasus terkonfirmasi dalam 24 jam. Peningkatan angka kasus yang melonjak ini membuat WHO menetapkan status darurat kesehatan global. Virus ini kemudian dinamai sebagai *CoronaVirus Disease-2019* atau lebih dikenal dengan COVID-19 (Davies, 2002).

Kasus COVID-19 pertama di Indonesia diumumkan secara resmi oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020. Virus tersebut menjangkit dua orang warga Indonesia yang dinyatakan positif setelah beberapa hari melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang yang sedang berkunjung ke Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya terdapat kasus orang meninggal di Indonesia yang diakibatkan oleh COVID-19 yakni laki-laki asal Solo yang berusia 59 tahun. Berdasarkan informasi yang diberitakan, korban terinfeksi virus tersebut setelah menghadiri seminar di Bogor pada Februari 2020 (Nursofwa et al., 2020). Pada 2 maret 2020, WHO secara resmi menyatakan COVID-19 sebagai pandemi karena kasus infeksi virus tersebut telah mencapai lebih dari 118.000 kasus yang menjangkit lebih dari 110 negara di dunia.

Dikutip dari Majalah Time, Dirjen WHO menyatakan bahwa pandemi yang terjadi tidak hanya mengakibatkan krisis kesehatan masyarakat namun juga akan menyentuh setiap sektor kehidupan (Azizah, 2020). Merespon hal tersebut Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sehingga wajib dilakukan upaya penanggulangan dan pencegahan (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2020).

Salah satu upaya untuk mengendalikan pandemi COVID-19 adalah memproduksi vaksin untuk membentuk kekebalan kelompok di masyarakat. Menurut para ilmuwan, Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu cara untuk keluar dari pandemi. Para ilmuwan ini percaya bahwa tanpa vaksin kekebalan kelompok secara alami tidak akan cukup untuk memulihkan masyarakat ke keadaan normal dan hal tersebut akan mengakibatkan kematian yang ekstrim. Oleh karena itu, dengan bantuan vaksin, orang-orang dapat melawan virus dari luar dengan kekebalan tubuh, sehingga semakin banyak orang yang divaksin maka kekebalan kelompok akan semakin cepat tercapai (Moore, 2021). Oleh karena itu, negara-negara di dunia berlomba-lomba untuk memproduksi vaksin atau memperoleh vaksin dari negara lain agar dapat perlahan memulihkan keadaan kesehatan di negaranya masing-masing. Berdasarkan penelitian, diperkirakan produksi vaksin akan mencapai 70 persen dari 7,8 Miliar populasi masyarakat dunia pada tahun 2021. Hal ini tentunya merupakan berita baik jika distribusinya merata di seluruh belahan dunia.

Namun faktanya, sebagian besar vaksin telah diamankan oleh negara-negara kaya yang mampu memproduksi vaksin atau membelinya dari negara lain. Bahkan, terdapat beberapa negara produsen vaksin yang membatasi ekspor vaksin untuk memastikan bahwa warga negaranya mendapatkan vaksin terlebih dahulu, fenomena ini dijuluki sebagai “nasionalisme vaksin”. Dilihat dari laporan *Global Dashboard for Vaccine Equity* (yang didirikan oleh *United Nations Development Program* (UNDP), WHO dan *Oxford University*) ketimpangan akses vaksin yang didapatkan oleh negara di dunia sangat jelas adanya. Per tanggal 15 September 2021, hanya 3,07 persen orang di negara-negara berpenghasilan rendah yang telah divaksinasi dengan setidaknya satu dosis, sedangkan negara-negara kaya berhasil melakukan vaksinasi hingga 60,18 persen. Salah satu bukti ketimpangan yang ditunjukkan oleh data adalah perbandingan antara persentase tingkat vaksinasi masyarakat di Inggris dan di Republik Demokratik Kongo, dimana tingkat vaksinasi di Inggris dari orang-orang yang telah menerima setidaknya satu dosis vaksin adalah sekitar 70,92 persen, sedangkan tingkat vaksinasi di Republik Demokratik Kongo

hanya 0,09 persen dari populasi yang telah menerima satu dosis vaksin (United Nations, 2021).

Ketimpangan akses vaksin dan pengamanan vaksin yang dilakukan oleh negara maju membuat negara non produsen (mayoritas negara berkembang dan negara berpenghasilan rendah) harus melakukan usaha maksimal untuk bisa memperoleh vaksin di tengah jumlah produksi vaksin yang terbatas. Usaha ini dilakukan dengan berbagai upaya agar memastikan bahwa negara bisa mendapatkan vaksin untuk memenuhi kebutuhan warga negaranya. Pada kondisi dimana permintaan dan kebutuhan vaksin meningkat namun ketersediannya terbatas, maka vaksin akan menjadi komoditas yang diperebutkan oleh banyak orang. Hal inilah yang menyebabkan negara-negara saling berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin dan tidak jarang melakukan berbagai strategi untuk dapat memenuhi kebutuhan negaranya. Namun tentunya, dalam kasus pandemi seperti ini, memenuhi kebutuhan dalam negeri saja tidak cukup karena penularan virus dapat terjadi dari aktivitas lintas batas yang tidak bisa terhindarkan di era globalisasi saat ini. Oleh karena itu, selain memenuhi kebutuhan vaksin dalam negeri, maka penting juga untuk memastikan bahwa negara lain juga dapat melakukan vaksinasi ke warga negaranya agar nantinya aktivitas hubungan antar negara dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, terlaksananya vaksinasi dalam negeri dan di negara lain menjadi kepentingan yang perlu diwujudkan jika ingin benar-benar keluar dari pandemi.

Indonesia sebagai salah satu negara yang belum memproduksi vaksin di tahun 2020, berupaya untuk mendapatkan vaksin COVID-19 dari negara lain yang menjadi produsen vaksin dan melakukan kerja sama pengembangan vaksin sebagai usaha membangun kemandirian produksi vaksin dalam negeri. Peran pemerintah kemudian menjadi sangat krusial pada kondisi dimana terjadinya kompetisi perolehan vaksin di dunia internasional. Pemerintah Indonesia sendiri mulai gencar mengupayakan perolehan vaksin sejak bulan Agustus 2020. Hal ini diawali dengan ditunjuknya Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Tohir, oleh Presiden Joko Widodo untuk membuka akses kerja sama dalam pengembangan vaksin, meratakan jalan distribusi vaksin, dan mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam upaya memperoleh vaksin COVID-19 (Satgas COVID-19, 2020).

Upaya Indonesia sejak Agustus 2020 dalam memperoleh vaksin dan melakukan vaksinasi ke warga negaranya mulai menunjukkan keberhasilan di akhir tahun 2021. Pada 22 Desember 2021, Indonesia berhasil melakukan vaksinasi dosis lengkap kepada 40,12% dari total populasi masyarakatnya (KOMINFO RI, 2021). Persentase tersebut telah mencapai target vaksinasi yang dicanangkan oleh WHO, yakni setidaknya 40% dari total

populasi masyarakat di dalam negara bisa mendapatkan vaksin dosis lengkap di akhir tahun 2021. Hal tersebut membawa Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-4 jumlah vaksinasi COVID-19 terbanyak di dunia pada 4 Januari 2022, dengan jumlah suntikan 283.554.361 dosis vaksin untuk 166,65 juta sasaran vaksin. Indonesia berada di peringkat ke-4 setelah Republik Rakyat Tiongkok, India, dan Amerika Serikat, dimana ketiga negara tersebut telah memproduksi vaksin sendiri untuk memenuhi kebutuhan negaranya (Kementerian Kesehatan RI, 2022).

Kondisi ini merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena Indonesia merupakan salah satu negara yang berhasil memperoleh banyak vaksin di saat distribusi vaksin didominasi oleh kalangan negara maju dan di tengah dinamika nasionalisme vaksin serta upaya kapitalisasi vaksin. Tentunya hal itu sulit dilakukan jika Pemerintah Indonesia tidak memiliki strategi untuk memperoleh vaksin dan mencapai tingkat vaksinasi yang diharapkan. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk meneliti strategi diplomasi vaksin yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memperoleh vaksin dan berupaya membangun kemandirian produk vaksin COVID-19 di masa pandemi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut **“Bagaimana strategi diplomasi vaksin Indonesia dalam pengadaan dan pengembangan vaksin COVID-19 di masa pandemi?”**

## **C. Kerangka Konseptual**

Penulis menggunakan beberapa konsep dalam ilmu hubungan internasional sebagai alat untuk menganalisis praktik-praktik diplomasi vaksin yang dilakukan pemerintah Indonesia. Konsep-konsep yang digunakan, yakni diplomasi, diplomasi bilateral, diplomasi multilateral, diplomasi vaksin, diplomasi kesehatan global dan konsep *international collective action*. Berikut penjelasannya:

### ***Diplomasi***

#### **Definisi**

##### a. Diplomasi

Berdasarkan sejarahnya, secara etimologis, diplomasi berasal dari kata Yunani *“diploun”* yang memiliki arti melipat. Hal ini didasarkan pada fenomena yang terjadi di masa Kekaisaran Romawi dimana semua paspor yang melewati lintas negara dan surat-surat jalan dicetak pada rangkaian piringan logam, yang kemudian dilipat dan dijahit menjadi satu. Surat jalan logam tersebut dikenal dengan sebutan *“diplomas”*.

Perkembangan sebutan terkait hal ini kemudian semakin banyak digunakan pada masa abad pertengahan. Dimana pada saat itu, semua surat resmi negara yang dikumpulkan, disimpan menjadi arsip negara, dan semua dokumen yang berhubungan dengan hubungan internasional dikenal dengan nama “diplomaticus” atau “diplomatique”. Pihak-pihak yang berhubungan dengan surat-surat tersebut dikenal sebagai pemilik “res diplomatique” atau “bisnis diplomatik” (Setiawan, 2016). Pada tahun 1796, istilah “diplomasi” dalam Bahasa Inggris diperkenalkan oleh filsuf dan ilmuwan politik, Edmund Burke. Istilah ini mengacu pada kata “diplomate” dalam Bahasa Perancis yang diartikan sebagai orang yang berwenang untuk bernegosiasi atas nama negara, dan *corps diplomatique* merujuk pada pejabat yang terlibat dalam kebijakan luar negeri (Diplomacy Edu, 2022). Pada perkembangannya, muncul banyak definisi istilah diplomasi dari berbagai ilmuwan hubungan internasional (HI). Sir Ernest Satow (1979) mendefinisikan diplomasi sebagai penerapan kecerdasan dan kebijaksanaan untuk pelaksanaan hubungan resmi antara pemerintah negara-negara merdeka atau pelaksanaan bisnis antar negara dengan cara damai (Satow et al., 1979).

Dari berbagai definisi mengenai diplomasi, S.L. Roy kemudian menarik elemen-elemen penting dalam pendefinisian istilah tersebut. Elemen-elemen tersebut diantaranya;

1. Unsur pokok diplomasi adalah negosiasi;
2. Negosiasi dilakukan untuk mengedepankan kepentingan negara;
3. Tindakan-tindakan diplomatik dilakukan dengan maksud menjaga dan memajukan kepentingan nasional sejauh mungkin yang bisa dilaksanakan dengan sarana damai. Oleh karena itu, tujuan utama diplomasi adalah memelihara perdamaian dengan tidak mengabaikan kepentingan nasional.
4. Teknik-teknik diplomasi sering dipakai untuk menyiapkan perang dan bukan untuk menghasilkan perdamaian. (Tetapi apabila cara damai gagal untuk menjaga kepentingan nasional, kekuatan biasanya digunakan, sehingga terdapat keterkaitan antara diplomasi dan perang).
5. Diplomasi dihubungkan erat dengan tujuan politik luar negeri suatu negara;
6. Diplomasi modern dihubungkan erat dengan sistem negara;
7. Diplomasi juga tak bisa dipisahkan dari perwakilan negara (Setiawan, 2016).

Menurut Kautilya, diplomasi dilakukan negara dengan tujuan utama untuk “mengamankan kepentingan negara sendiri dan memelihara keamanan”. Namun, terdapat tujuan penting lainnya yang hendak dicapai negara, diantaranya:

1. Memajukan ekonomi;

2. Perdagangan dan kepentingan komersil;
3. Perlindungan warganegara sendiri di negara lain;
4. Mengembangkan budaya dan ideologi;
5. Peningkatan prestise nasional;
6. Memperoleh persahabatan dengan negara lain, dan kepentingan lainnya (Setiawan, 2016).

Pada perkembangannya, terdapat praktik-praktik diplomasi yang dilakukan untuk tujuan tertentu. Praktik diplomasi tersebut mengelompokkan berbagai tindakan yang memiliki suatu tujuan dalam isu yang sama, misalnya diplomasi ekonomi, diplomasi kesehatan, dan diplomasi pada isu tertentu lainnya. Salah satu bentuk diplomasi tersebut adalah diplomasi vaksin.

#### b. Diplomasi Vaksin

Sejak vaksin ditemukan pertama kali di tahun 1789, diplomasi menjadi salah satu metode yang digunakan oleh Rusia, Turki, Spanyol bahkan suku asli Amerika di wilayah Meksiko untuk melaksanakan upaya vaksinasi. Diplomasi vaksin sangat erat kaitannya dengan diplomasi kesehatan global. Artikel dari Kickbusch, Silberschmidt, dan Buss (2020) mendefinisikan diplomasi kesehatan global sebagai proses negosiasi multi-level dan multi-aktor yang membentuk dan mengelola lingkungan kebijakan global untuk kesehatan. Definisi ini mencoba untuk menyamakan diplomasi kesehatan dengan tata kelola kesehatan dan kesepakatan untuk meningkatkan kesehatan global. Sejalan dengan hal ini, Lee dan Smith (2011) mendefinisikan diplomasi kesehatan global sebagai negosiasi tentang masalah kesehatan penduduk yang memerlukan tindakan kolektif di seluruh dunia untuk mengatasinya secara efektif (Almeida, 2020).

Pada tahun 1800, istilah diplomasi vaksin diperkenalkan oleh Edward Jenner. Diplomasi vaksin terbagi menjadi dua bentuk, yakni diplomasi vaksin (*Vaccine Diplomacy*) dan diplomasi sains vaksin (*Vaccine Science Diplomacy*). Hal yang membedakan kedua bentuk diplomasi ini terletak pada asal pendefinisianya. Diplomasi vaksin merupakan sebuah cabang dari diplomasi kesehatan global (*Global Health Diplomacy*) yang berkaitan dengan penggunaan dan pengiriman vaksin. Sedangkan diplomasi sains vaksin merupakan percampuran unik dari kesehatan global dan diplomasi sains. Pada penelitian ini, Penulis berfokus pada aktivitas diplomasi vaksin yang merujuk kepada hampir seluruh aspek dari diplomasi kesehatan global, namun terbatas pada penggunaan dan pengiriman vaksin yang meliputi beberapa organisasi strategis seperti GAVI (*Global Alliance for Vaccines and Immunization*), WHO (*World Health Organization*), Gates Foundation, dan organisasi internasional yang bergerak

pada kegiatan tersebut lainnya. Hal utama yang ditekankan pada diplomasi vaksin adalah potensinya sebagai intervensi kemanusiaan dan pembuktian perannya dalam memediasi perselisihan dan bahkan genjatan senjata selama kampanye vaksinasi.

Ramadhan Muhamin (2001) dalam tulisannya menyatakan bahwa diplomasi vaksin secara karakteristik masuk ke dalam kategori diplomasi baru yang terbuka (*new diplomacy*) dimana karakteristik yang menonjol dari jenis diplomasi ini adalah menekankan pada sifat kerjasama (*corporation*), akomodasi (*accommodation*), dan oposisi (*opposition*). Diplomasi ini memberikan gambaran baru terhadap wajah diplomasi, dimana sebelumnya diplomasi dijalankan dengan cara diplomasi lama (*old diplomacy*) yang sifatnya cenderung negosiatif, konsensif, konfliktual (*making conflict*), dan penuh ancaman (*threat*). Diplomasi baru menawarkan cara melihat ojek tanggung jawab yang berbeda, dimana objek tanggung jawab dari proses diplomasi tidak lagi hanya sebatas negara saja, namun diarahkan kepada kemanusiaan. Sehingga diplomasi pada dasarnya dilakukan tidak hanya sebatas untuk mencapai kepentingan nasional negara itu sendiri, tetapi tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warga negaranya (Muhamin et al., 2021).

## **Klasifikasi**

Pada praktiknya, diplomasi seringkali dilakukan melalui dua jalur, yakni diplomasi bilateral dan diplomasi multilateral.

### **a. Diplomasi Bilateral**

Diplomasi bilateral merupakan proses menangani hubungan antar kedua negara yang ditujukan untuk mencapai kepentingan mereka bersama. Diplomasi bilateral tidak hanya dilakukan oleh kementerian luar negeri saja, melainkan juga dapat dilakukan oleh kementerian dan lembaga resmi lainnya yang berkolaborasi dalam agenda bilateral mereka. Diplomasi bilateral ini dilakukan untuk memenuhi kepentingan bersama dalam berbagai bidang kerja sama. Ketika terjadi perselisihan atau masalah, kedua negara biasanya bekerja sama untuk menyelesaikan perbedaan. Untuk memperlancar diplomasi bilateral, didirikan kedutaan besar yang berlokasi di ibu kota negara mitra, kedutaan inilah yang menjadi saluran utama untuk melakukan diplomasi bilateral. Dalam penugasannya, kedutaan kemudian melibatkan banyak aktor untuk menjadi mitra dalam mencapai kepentingan negara pengirim terhadap negara penerima (Rana, 2018).

### **b. Diplomasi Multilateral**

Diplomasi multilateral adalah pengelolaan hubungan internasional melalui negosiasi antara tiga negara atau lebih melalui perwakilan diplomatik atau pemerintah,

namun juga dapat dilakukan oleh perwakilan aktor non-negara. Diplomasi multilateral memiliki ciri-ciri multi-pihak, multi-isu, multi-peran, dan multi-nilai. Negosiasi pada tingkat multilateral memiliki tingkat kerumitan yang jauh lebih besar daripada diplomasi bilateral sehingga membutuhkan keterampilan yang juga ekstra dalam berdiplomasi (Jr., 2020). Diplomasi multilateral melibatkan organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), badan-badan khusus, organisasi dunia lainnya, dan konferensi global yang mana melibatkan kelompok negara bahkan komunitas global. Negara-negara kecil biasanya menggunakan forum multilateral untuk melakukan mobilisasi dukungan isu-isu penting bagi mereka (Rana, 2018).

### **Strategi Diplomasi**

Negara yang diwakili oleh perwakilan resmi maupun aktor-aktor lainnya berusaha menyampaikan kepentingan nasional melalui berbagai strategi diplomasi, diantaranya:

1. Korespondensi

Praktik korespondensi dilakukan negara untuk menyampaikan kepentingan nasionalnya melalui jalur resmi surat menyurat dokumen negara. Korespondensi tersebut akan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan antar negara sebagai hasil dari diplomasi. Contoh praktik diplomasi korespondensi ini dilakukan oleh Arab Saudi ketika mengirimkan nota diplomatik kepada Indonesia terkait penerimaan terhadap calon jamaah umrah dengan vaksin Sinovac dan Sinopharm.

2. Pembicaraan tidak resmi

Praktik diplomasi pembicaraan tidak resmi dilakukan dengan saling menyampaikan cara pandang dan melobi secara langsung maupun tidak langsung. Praktik ini sering digunakan oleh negara yang memiliki kedekatan satu sama lain yang biasanya dilakukan oleh para pejabat negara. Pembicaraan tidak resmi bisa dilakukan di sela-sela pertemuan internasional, melalui pertemuan langsung maupun melalui sambungan telepon. Contoh praktik pembicaraan tidak resmi ini dilakukan oleh Presiden Indonesia dan Presiden Tiongkok melalui sambungan telepon. Pada pembicaraan tersebut Presiden Jokowi melobi untuk meningkatkan jumlah kiriman vaksin COVID-19 yang akan dikirimkan ke Indonesia untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

### 3. Kunjungan kenegaraan

Strategi diplomasi berupa kunjungan ke negara mitra merupakan salah satu praktik diplomasi yang sering dilakukan aktor negara untuk menciptakan situasi kedekatan antar pengambil keputusan dan pihak yang menjalankan kerja sama. Dalam kunjungan kenegaraan, biasanya pihak yang berkunjung akan membawa potensi-potensi kerja sama dengan negara yang dikunjungi. Pada pertemuan tersebut, antara pihak negara yang berkunjung dengan negara yang menerima kunjungan akan saling bernegosiasi untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara dalam kerangka kerja sama. Berkunjung langsung ke suatu negara merupakan bentuk penghormatan terhadap negara mitra dan bentuk keseriusan bahwa keberadaan negara mitra tersebut penting bagi negara yang berkunjung. Oleh karena itu, biasanya sehabis kunjungan langsung akan banyak kerja sama yang dihasilkan antar negara sebagai tindak lanjut dari pertemuan langsung tersebut (Muhamin et al., 2021). Praktik diplomasi kunjungan kenegaraan ini dilakukan Indonesia untuk menjajaki kerja sama pengadaan vaksin dengan Inggris.

#### ***International Collective Action***

Isu distribusi vaksin yang sekarang sedang menjadi perbincangan, secara umum masuk ke dalam isu kesehatan global, yang merupakan salah satu isu penting yang sering dibahas di dalam forum multilateral. Dalam forum multilateral tersebut, negara-negara berkumpul dan masing-masing memberikan kontribusi untuk mewujudkan tujuan bersama mereka yakni menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait isu kesehatan global. Pada isu kesehatan global, bentuk kontribusi negara akan dianalisis dengan menggunakan konsep *international collective action*. *The Lancet Commissions* melalui dokumen “*Global Health 2035: a World Converging within a Generation*” menyatakan bentuk kontribusi dalam isu kesehatan global dilakukan melalui beberapa fungsi, yaitu:

#### 1. Kepemimpinan dan kepengurusan

Pada bentuk ini, suatu negara atau aktor internasional berperan dalam perumusan konsensus dalam negosiasi dan perundingan internasional, aktif melakukan advokasi isu-isu lintas sektoral (seperti isu perdagangan dan kesehatan);

#### 2. Memastikan penyediaan global public goods

Pada bentuk ini, negara atau aktor internasional berkontribusi pada penemuan pengembangan, dan pengiriman alat kesehatan baru dalam rangka mendukung kesehatan global. Negara juga melakukan penelitian, analisis efektivitas biaya, dan penetapan prioritas penelitian alat dan penentuan metodologi survei. Dalam hal

pengetahuan, negara berkontribusi dalam menghasilkan dan membagikan pengetahuan, termasuk berbagi kekayaan intelektual, dan harmonisasi norma, standar dan pedoman, serta melakukan pembentukan pasar.

### 3. Manajemen eksternalisasi

Pada bentuk ini, negara berperan dalam merespon ancaman global (contohnya: pandemi flu, resistensi antibiotik, dan peredaran obat-obatan palsu) serta melakukan pengawasan dan berbagi informasi.

### 4. Bantuan langsung negara

Pada bentuk ini, bentuk kontribusi merujuk pada kerja sama bilateral dalam bentuk kerja sama teknis di tingkat nasional, seperti bantuan pembangunan untuk sektor kesehatan, serta bantuan urat kemanusiaan dalam merespon bencana alam (Laksono et al., 2018).

Pemerintah Indonesia melakukan diplomasi vaksin dengan tujuan untuk memperoleh dan menjalin kerjasama pengembangan produksi vaksin dalam negeri. Terdapat perbedaan strategi yang dilakukan Indonesia dalam menjalankan diplomasi vaksin, hal ini tergantung pada jenis hubungan yang ingin Indonesia bangun terhadap negara atau pihak lain. Diplomasi vaksin yang dilakukan antara Indonesia dengan salah satu negara, atau biasa disebut jalur bilateral, cenderung menggunakan pendekatan yang intensif seperti yang dikatakan oleh Sir Ernest Satow, yakni melalui pembicaraan tidak resmi, saling menyampaikan cara pandang, melobi secara langsung antar pejabat negara, dan kunjungan kerja untuk menjalin kerja sama. Sedangkan strategi yang Indonesia susun untuk melakukan diplomasi vaksin di forum internasional terkait kesehatan dan distribusi vaksin cenderung menunjukkan pola kontribusi tertentu untuk mencapai kepentingan nasionalnya, yakni berkontribusi pada fungsi kepemimpinan dan kepengurusan serta memastikan penyediaan *global public goods*.

## D. Hipotesis

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Penulis menyimpulkan jawaban sementara mengenai strategi Indonesia untuk memperoleh vaksin ialah:

1. Menjadikan diplomasi vaksin COVID-19 menjadi prioritas diplomasi Indonesia.
2. Melakukan pendekatan bilateral secara intensif dengan negara produsen vaksin COVID-19 untuk memperoleh vaksin.
3. Melakukan diplomasi multilateral di berbagai forum internasional untuk menyuarakan kesetaraan dan keadilan vaksin bagi semua negara.

## **E. Tujuan Penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui strategi internal Pemerintah Indonesia untuk memperoleh dan mengembangkan vaksin COVID-19.
2. Mengetahui perkembangan praktik diplomasi vaksin Indonesia dalam memperoleh dan mengembangkan vaksin yang dilakukan melalui kerja sama bilateral dan multilateral.

## **F. Batasan Penelitian**

Penulis melakukan penelitian data dengan memberikan jangkauan penelitian yang terhitung sejak Maret 2020 hingga tahun 2022. Hal ini dikarenakan pada Maret 2020 merupakan waktu temuan pertama kasus COVID-19 di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan berfokus pada salah satu entitas dalam hubungan internasional yakni aktor negara. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai praktik-praktik diplomasi vaksin yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia sebagai representasi dari aktor negara.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini melakukan pengumpulan data berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan penelitian media. Pengumpulan data dilakukan dengan menghimpun informasi yang relevan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini dimana data diperoleh dari buku, karya ilmiah, jurnal, dokumen kebijakan Indonesia, komunikasi pemerintah pada jumpa pers, pernyataan resmi, pidato publik, website pemerintah, dan artikel dan berita dari media nasional dan internasional.

### **2. Metode Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Menurut Sugiyono (2014) metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

### **3. Metode interpretasi data**

Penulis melakukan interpretasi data dengan menghubungkan hasil analisis data dengan kerangka pemikiran kemudian meninjau keterkaitan antara konsep yang digunakan dalam kerangka pemikiran dengan permasalahan yang diteliti. Interpretasi

juga dilakukan dengan memberikan tambahan pandangan kritis terhadap analisis data yang telah dilakukan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini direncanakan memiliki struktur penulisan dengan pembagian bab-bab sebagai berikut:

**BAB I** merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya berisi latar belakang masalah yang menguraikan alasan Penulis meneliti penelitian ini, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, tujuan penelitian, batasan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dalam skripsi ini.

**BAB II** berisi tentang pembuktian hipotesis yakni penjelasan dan analisis menggunakan kerangka konseptual mengenai strategi diplomasi vaksin yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk memperoleh vaksin COVID-19 lewat jalur bilateral dan jalur multilateral.

**BAB III** berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan saran kepada pembaca yang diberikan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.